

# Tutupi Kasus Covid-19 Industri Bisa Dihukum

**KARAWANG, RAKA** - Penyebaran virus corona di Kabupaten Karawang setiap hari terus mengalami peningkatan, semua masyarakat diminta kooperatif dan melaporkan setiap kasus kepada Satgas Covid-19 atau puskesmas terdekat. Saat ini, disinyalir ada industri yang tidak mau terbuka terkait kasus Covid-19 di lingkungannya.

Juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Karawang, dr. Fitra Hergyana Sp.KK mengatakan, kasus penambahan pasien

Covid-19 di Karawang dalam beberapa hari terakhir agak mengkhawatirkan. "Dalam empat hari sudah lebih seribu warga Karawang terpapar Covid-19. Meskipun ini juga terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Barat maupun Indonesia, tapi ini menjadi perhatian kami," katanya, Rabu (23/6).

Ia juga meminta kepada masyarakat ataupun perusahaan agar segera melaporkan ke petugas Puskesmas, jika

melakukan uji swab mandiri dengan hasil reaktif. Fitra mengatakan, ada indikasi masyarakat maupun perusahaan yang tidak melaporkan hasil uji swab mandiri. "Kalau laporan mereka juga terbantu untuk obat-obatan. Kasian keluarga lainnya kalau sampai tidak lapor. Bisa menularkan ke anaknya, istrinya, suaminya atau orang tuanya. Laporan ini penting," pintanya.

Fitra menuturkan, sebagai langkah penekanan kasus ha-

rian yang cenderung meningkat, Pemkab Karawang telah mengeluarkan SE Bupati nomor 443/3635 - Disperindag terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan poin diantaranya memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, perkantoran, industri, penyekatan serta imbauan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melayangkan ancaman tegas kepada para

pelaku industri yang tidak melaporkan kasus Covid-19 di lingkungan perusahaannya. "Saya mengimbau, saya akan mengirim surat teguran kepada industri yang beberapa tidak melaporkan," tegasnya, Kamis (24/6).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyebutkan, ada empat tahapan sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku industri nakal itu, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda, hingga

diproses secara hukum. Tindakan tegas tersebut, kata Kang Emil, bertujuan untuk mengingatkan para pelaku industri yang enggan melaporkan kasus Covid-19. "Gara-gara industri tidak melaporkan terjadilah perpindahan kasus dari industri ke rumah tangga yang disebut klaster rumah tangga," ungkapnya.

Emil juga meminta pemerintah daerah kabupaten/kota di Jabar untuk memberikan informasi kepada para pelaku

industri mengenai pelaporan kasus Covid-19. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak melaporkan kasus COVID-19 di lingkungan industrinya. "Maka saya mengimbau kepada industri yang ada kasus mohon melaporkan ke satgas masing-masing. Kalau dianggap tidak jelas alurnya, saya titip Ibu Bupati pasang baliho alur bagaimana melaporkan dari industri, jadi tidak ada alasan," pungkasnya. **(asy/dis/sin)**